

REALITAS POLITIK ERA RESTORASI MEIJI DALAM NOVEL *HANAUZUMI* KARYA JUN'ICHI WATANABE

Intannia Cahyasari^a, Anwar Efendi^b

^aLinguistik Terapan, Program Pascasarjana Universitas Negeri Yogyakarta
intannia_c@yahoo.co.id

^bFakultas Bahasa dan Seni, Universitas Negeri Yogyakarta
efendianwar68@gmail.com

Abstrak

Hanauzumi adalah salah satu bentuk genre karya sastra berupa novel yang menjelaskan perjuangan dan perlawanan Ginko Ogino sebagai tokoh utama perempuan dalam upayanya memenuhi hak-haknya selama era Restorasi Meiji. Penelitian ini bertujuan untuk mencari dan mendeskripsikan wujud realitas politik pada masa pemerintahan Meiji yang banyak dialami tokoh utama dalam novel *Hanauzumi*. Hegemoni kekuasaan yang terjadi pada zaman pemerintahan Shogun tercermin dari praktik politik yang dijalankan dengan menutup Jepang dari pengaruh dunia luar untuk melanggengkan kekuasaannya. Pemerintahan Shogun pada akhirnya tidak bisa mempertahankan kekuasaannya karena dihadapkan dengan kemajuan zaman yang terus berubah. Kemudian muncul era Restorasi Meiji, yaitu diadopsinya pemikiran-pemikiran Barat melalui kebijakan modernisasi negara oleh pemerintah Jepang dengan meniru secara besar-besaran apa yang dilakukan oleh negara Barat dalam membangun negara. Benturan-benturan terkait dengan realita politik pada masa inilah yang sering dialami oleh tokoh utama novel ketika dia berupaya memperoleh hak-haknya sebagai perempuan dan warga negara.

Kata Kunci: politik; restorasi meiji; hak perempuan; novel

Abstract

Hanauzumi is a literary genre in the form of a novel that explains the struggle and resistance of Ginko Ogino as the main character of women in their efforts to fulfill their rights during the Meiji Restoration era. This study aims to find and describe the form of political reality during the Meiji Government that many main characters experienced in the Hanauzumi novel. The power hegemony that occurred during the Shogun era was reflected in the political practices carried out by closing Japan from the influence of the outside world to perpetuate its power. The Shogun Government finally could not maintain its power because it was faced with the progress of the changing times. Then came the era of the Meiji Restoration, namely the adoption of Western thoughts through the state modernization policy by the Japanese government by mimicking what was done by Western countries in building the country. Clashes related to political reality at this time are often experienced by the main character of the novel when he seeks to obtain his rights as a woman and a citizen.

Keywords: politics; meiji restoration; women's right; novel

Pendahuluan

Negara merupakan realitas politik yang nyaris diterima sebagai sesuatu yang *given*. Kecenderungan tersebut terjadi karena praktik bernegara yang terkesan berada di luar

jangkauan kesadaran manusia. Dalam tataran kesadaran individual, negara dirasakan kehadirannya manakala individu mengalami benturan dengan kekuasaan. Bahwa terdapat reali-

tas kekuasaan di luar dirinya, yang berada dalam atmosfer publik, tetapi justru cukup berpengaruh pada kehidupannya sehari-hari (Patria & Arief, 2009:23).

Kekuasaan dipandang sebagai kemampuan memengaruhi perilaku dari individu atau kelompok terhadap sekelompok atau orang lain sedemikian rupa sehingga perilakunya mengalami penyesuaian dengan harapan serta tujuan dari yang mempunyai kekuasaan dimaksud (Budiardjo, 2008:35). Pada titik ini, kekuasaan menjelma menjadi objek perhatian oleh sebagian khalayak dengan beragam harapan dan tujuan. Khalayak tersebut memerlukan regulasi kekuasaan yang dapat mengakomodasinya sehingga dapat mengendalikan individu atau kelompok lain dalam rangka memenuhi kepentingannya.

Politik merupakan hal yang tidak pernah bisa terlepas dari lingkungan hidup manusia. Di mana saja berada, bagaimana keadaannya (sadar atau tidak, mau atau tidak), pusaran politik akan selalu memengaruhi kehidupan baik itu peran sebagai individu maupun peran dalam kelompok masyarakat. Surbakti (2010:10) menyimpulkan bahwa politik merupakan hubungan yang terjalin antara pemerintah dan warga masyarakatnya, sebagai upaya membuat dan melaksanakan suatu kebijakan yang mengikat mengenai kebaikan bersama suatu masyarakat yang tinggal dalam area tertentu.

Menurut Budiardjo (2008:15) politik adalah usaha untuk menentukan peraturan-peraturan yang dapat diterima baik oleh sebagian besar warga, untuk membawa masyarakat ke arah kehidupan bersama yang harmonis. Usaha menggapai *the good life* ini menyangkut bermacam-macam kegiatan yang antara lain menyangkut proses penentuan tujuan dari sistem, serta cara-cara

melaksanakan tujuan itu. Masyarakat mengambil keputusan mengenai apakah yang menjadi tujuan dari sistem politik itu dan hal ini menyangkut pilihan antara beberapa alternatif serta urutan prioritas dari tujuan-tujuan yang telah ditentukan itu.

Realitas menunjukkan selalu ada yang memerintah dan diperintah, yang kemudian menjadi sebuah penindasan apabila perintah yang diberikan menjurus kepada pemaksaan. Kelompok sosial yang kemudian memimpin tersebut, melaksanakan kepemimpinan harus mendapatkan kekuasaan agar menjadi kekuasaan yang dominan dan harus meneruskan untuk memimpin, yang selanjutnya oleh Gramsci disebut hegemoni (Patria & Arief, 2009: 117-118). Hegemoni bukanlah pertalian dominasi dengan memanfaatkan kekuasaan, melainkan pertalian persetujuan dengan memanfaatkan kepemimpinan politik dan ideologis (Simon, 2004:19). Hegemoni merupakan pertalian antara kelas dengan kekuatan sosial lain. Kelompok kelas yang bersifat hegemoni merupakan kelas yang memperoleh persetujuan dari kekuatan dan kelas sosial lain dengan cara membuat dan mempertahankan sistem ikatan antara dua negara atau lebih dengan usaha politik dan ideologis. Rancangan ideologi dibentuk dengan menyisipkan beberapa rancangan lain yang berkaitan dengannya.

Kesusastraan, dalam kerangka teori hegemoni Gramsci, menjadi salah satu bagian dari dunia gagasan, kebudayaan, superstruktur yang tidak hanya sebagai refleksi dari struktur kelas ekonomi atau infrastruktur yang bersifat material, melainkan juga sebagai salah satu kekuatan material itu sendiri. Karya sastra sebagai pengungkapan ideologi yang disalurkan pengarang lewat karyanya untuk dibaca dan dipahami. Sebagai produk kebudayaan, karya sastra merupakan situs hegemoni. Di dalam

karya sastra terjadi ideologi yang menghegemoni di masyarakat di *counter* dengan ideologi pengarang. Tami, dkk (2017:13-14) menjelaskan bahwa novel sebagai karya seni juga difungsikan sebagai arena ideologi bersaing dan bernegosiasi. Novel memiliki peran hegemonik yang signifikan karena sastra memiliki kekuatan untuk menangkap dan membangkitkan perasaan dari para pembaca.

Di antara *genre* karya sastra lainnya, novel dianggap paling dominan dalam menampilkan unsur-unsur sosial karena menampilkan unsur-unsur cerita yang paling lengkap, memiliki media yang paling luas, menyajikan masalah-masalah kemasyarakatan yang juga paling luas, dan bahasa novel merupakan bahasa sehari-hari yang paling umum digunakan dalam masyarakat (Ratna, 2007:335-336). Untuk itulah novel kerap dijadikan alat untuk menyampaikan pesan atau aspirasi ketidakpuasan terhadap suatu kondisi yang dianggap kurang benar dalam sebuah kehidupan sosial.

Lebih lanjut Whitebrook (1995:59-60) menjelaskan bahwa sastra dapat diambil sebagai sumber utama kajian politik sehingga dapat dimasukkan dalam sejarah politik, perkembangan gerakan politik, atau gagasan politik. Sastra menampilkan bagaimana menjalani kehidupan yang baik, atau bagaimana mengatasi dilema moralitas politik. Naskah sastra mengandung makna dan menemukan identitas dalam situasi intensitas politik. Politik 'narasi' atau 'pengisahan cerita' dan teks sastra terutama novel sebagai bentuk narasi sastra. Ada hubungan antara konsep 'narasi' dan 'fiksi' serta teori politik. Kepentingan dan praktik-praktik politik tercermin dalam penggambaran novel, dengan cara karakterisasi diri.

Dengan novelnya, Jun'ichi Watanabe berusaha menggoyang kelanggengan wacana tradisi yang sudah mengakar kuat pada pola pikir masyarakat Jepang sebagai imbas dari penerapan *sakoku* atau Politik Isolasi dalam kurun waktu melebihi tiga ratus lima puluh tahun oleh masa kekuasaan Tokugawa. Adanya peralihan kekuasaan menuju era Kekaisaran Meiji dan dihentikannya Politik Isolasi menandakan Jepang dibuka untuk dunia dan arus modernisasi sebagai pengaruh dari Barat mulai masuk ke Jepang. Satu usaha yang dilakukan dengan menghadirkan wacana modern yang membawa pola pikir maju dalam novel *Hanauzumi* (Cahyasari, 2017).

Pada tahun-tahun sebelum pembukaan Jepang oleh bangsa-bangsa Barat, perhatian Eropa dan Amerika Serikat telah mulai tertuju ke arah timur jauh guna mencari tempat perdagangan yang lebih menguntungkan, terlebih setelah bangsa-bangsa Barat berhasil "membagi-bagi" negara Cina dengan menanamkan pengaruh, dan mengeksploitasi mereka. Setelah keberhasilan itu maka konsentrasi mereka ditujukan kepada Jepang. Letak geografis dan sumberdaya alam Jepang yang strategis dianggap dapat memberikan keuntungan ekonomis bagi bangsa Barat, yaitu dengan cara menjadikan Jepang sebagai tempat pengambilan bahan mentah dan tempat penanaman modal. Faktor lain yang mendorong Amerika Serikat ingin membuka Jepang agar pemerintah Jepang mau melindungi awak kapal Amerika Serikat yang terdampar di pantai Jepang (Agung, 2012:105).

Realitas politik sebagai akibat dari pertemuan budaya Jepang dengan budaya Barat yang terjadi pada peralihan era pemerintahan Shogun (Edo) menuju era pemerintahan kekaisaran (Meiji) tersebut merupakan salah satu contoh jenis kehidupan maupun gejolak

sosial yang dapat ditemukan dan ditelusuri dari berbagai media pengungkapan yang dilakukan seseorang atau sekelompok tertentu dan salah satunya melalui karya sastra. Di dalam karya sastra tentu menyajikan sebuah kehidupan yang berasal dari kenyataan sosial. Dan karya sastra yang menggambarkan mengenai kehidupan sosial masyarakat tentu di dalamnya akan beriringan dengan kekuasaan. Karya sastra sebagai pengungkapan realitas politik yang terjadi di masyarakat menjadi sangat penting untuk dilakukan penelusuran. Penelusuran realitas politik melalui karya sastra akan memberikan signifikansi terhadap kondisi sosial yang terjadi di masyarakat.

Hal ini sesuai dengan pendapat Ogun-dokun (2013:120-124) bahwa sastra adalah panggung penting untuk perjuangan sosio-politik, budaya, dan ekonomi. Suatu bentuk kreativitas yang meningkatkan transfer budaya dan pengetahuan dalam masyarakat. Dengan kata lain, sastra melukiskan kehidupan dengan tujuan untuk berbagi pengalaman, perasaan, imajinasi, pengamatan, temuan, prediksi dan saran kepada manusia untuk realitas sosial yang ada. Masyarakat berarti sebuah asosiasi orang yang terdiri dari orang-orang yang memiliki aturan perilaku seperti kepercayaan, kebiasaan, tradisi, konvensi, nilai-nilai sosial dan norma. Masyarakat ini terletak pada sastra. Sastra telah berubah menjadi media untuk membahas dan menjelaskan realitas kontemporer atau konvensional melalui eksposisi pengalaman sosial budaya dan politik masyarakat tertentu. Diperkuat oleh pendapat Dubey (2013:84) juga menjelaskan bahwa sejarah sastra berawal dari peradaban manusia. Masyarakat dibentuk oleh manusia dengan tujuan memenuhi kebutuhan dan aspirasi

manusia. Sastra dalam masyarakat tidak dapat dipisahkan satu sama lain, karena sastra tidak dapat dipertahankan tanpa masyarakat, dan juga masyarakat tidak dapat disadari berada dalam karya sastra. Sastra mencerminkan masyarakat. Apa yang terjadi dalam masyarakat tercermin dalam karya sastra, baik itu teks karya sastra berdasarkan informasi maupun imajinasi.

Penelitian terdahulu yang membedah novel *Hanauzumi* dan terkait dengan politik adalah kajian Heri Widodo yang berjudul *Strategi Dominasi Patriarki dalam Novel Hanauzumi karya Jun'ichi Watanabe* (2016). Kajian ini membahas tentang sistem patriarki yang mendominasi pada masa awal Restorasi Meiji 1868 di Jepang. Pada masa tersebut Jepang melakukan modernisasi negara dengan melakukan revolusi besar-besaran di berbagai aspek kehidupan dengan mengadopsi budaya Barat sebagai *role model*. Hasil dari upaya tersebut adalah terjadinya perubahan besar-besaran dalam masyarakat Jepang, tetapi ada satu sisi yang tetap bertahan dengan kuat, yaitu sistem patriarki.

Penelitian lain yang juga mengkaji novel *Hanauzumi* adalah karya Ni Luh Giri Prastasari yang berjudul *Upaya Tokoh Ogino Ginko Mencapai Kesetaraan Gender Dalam Novel Hanauzumi Karya Junichi Watanabe* (2014). Hasil analisis menunjukkan bahwa kendala yang dihadapi oleh tokoh utama untuk mencapai kesetaraan gender adalah adanya diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan gender yang dialami oleh perempuan. Diskriminasi itu meliputi marginalisasi, subordinasi, stereotipe, kekerasan, dan beban kerja ganda. Adapun upaya yang dilakukan oleh tokoh utama untuk memperoleh kesetaraan gender adalah menentukan tujuan hidup sendiri, bersikap pantang menyerah dan terus berusaha, dan meraih

kedudukan yang terhormat dalam masyarakat. Penelitian yang dipaparkan di atas lebih menitikberatkan perhatian pada bentuk ketidakadilan politik dan sisi perempuan yang direpresentasikan oleh Ginko sebagai tokoh utama. Hal itulah yang membedakan dengan fokus penelitian ini, yang bertujuan untuk mencari dan mendeskripsikan wujud realitas politik pada era Restorasi Meiji yang terkandung di dalam novel *Hanauzumi*.

Jenis penelitian ini adalah deskriptif kualitatif yang memiliki data berupa teks karya sastra. Ratna (2013:46-47) menjelaskan bahwa metode kualitatif memanfaatkan cara-cara penafsiran dengan menyajikannya dalam bentuk deskripsi. Sebagai bagian perkembangan ilmu sosial, kualitas penafsiran dalam metode kualitatif dengan demikian dibatasi oleh hakikat fakta-fakta sosial. Sumber data penelitian adalah novel *Hanauzumi* karya Jun'ichi Watanabe terbit tahun 1970 yang merupakan novel asli Jepang disertai dengan bantuan buku-buku studi kepustakaan yang ada hubungannya dengan penelitian dan data internet digunakan sebagai referensi. Adapun teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka yang berfungsi untuk mencari informasi yang berbentuk tulisan dengan cara membaca karya sastra, melakukan pencatatan yang sistematis, dan melakukan analisis.

Hasil dan Pembahasan

Pemulihan kekuasaan Kaisar Jepang untuk memerintah negaranya pada tahun 1868 melambangkan akhir periode Tokugawa yang feodal dan awal dari apa yang dikenal sebagai Restorasi Meiji (Brown, 2005:71). Pemerintahan Meiji berawal dari aliansi dua domain yang paling bertanggung jawab atas

penggulingan kekuasaan Keshogunan Tokugawa, yaitu Satsuma dan Choshu, yang juga didukung oleh domain Toza dan Hizen. Setelah berkuasa, Pemerintahan Meiji ingin memastikan adanya tatanan baru yang berkeadilan bagi rakyat Jepang. Pada tanggal 6 April 1868 Kaisar mengeluarkan *Charter Oath*, yang berjanji akan membentuk majelis untuk mengurus semua masalah melalui diskusi publik, serta menghapus perilaku feodalisme di masa lalu (Sumikawa, 1999:1; Takano, 2010:82). Era perubahan tersebut tercermin dalam kutipan data dari novel *Hanauzumi* di bawah ini (yang telah peneliti terjemahkan demi efektivitas ruang, hal ini juga berlaku untuk kutipan berikut-berikutnya):

“Zaman berubah. Tokugawa sudah tidak punya kekuasaan dan pemerintah telah di reformasi total.” Mata Ogie menerawang jauh ke depan. “Aku lebih sering pergi ke Tokyo dibandingkan kebanyakan orang di sini. Segala hal bergerak dan berubah. Menakjubkan sekali melihat betapa cepatnya perubahan yang terjadi”. (Watanabe, 1970: 46)

Periode Meiji membawa perubahan besar dalam sektor politik maupun sosial, yang menjadi fondasi Jepang modern. Jepang mengadopsi konstitusi dan menerapkan parlemen pemerintah dengan meniru Barat. Kaisar menjadi tokoh terkemuka dan kuat. Sistem Monarkhi ini menjadi instrumen yang efektif untuk menciptakan dan mempertahankan persatuan nasional. Secara sosial, Jepang membuat lompatan monumental dari masyarakat feodal menjadi negara industri modern (Sumikawa, 1999:15). Zaman ini ditandai dengan peningkatan interaksi dengan negara-negara Barat. Ide-ide baru, teknologi, dan wacana yang belum diartikulasikan sebelumnya di Jepang dituangkan ke dalam negeri. Banyak teknologi dan ide dirangkul. Dari gaya pakaian hingga ke

struktur manajemen kantor swasta dan publik (Walsh, 2009:56). Meskipun demikian, di Desa Tawarase, Saitama bagian Utara, tempat tinggal Gin Ogino, perubahan sosial politik yang terjadi di pusat pemerintahan belum terasa sepenuhnya:

Desa ini sangat udik sehingga masyarakatnya tidak pernah mengalami kejadian-kejadian luar biasa selain Sungai Tone yang meluap. Keadaannya jauh berbeda di Tokyo, di tempat pemerintahan Meiji belum lama dibentuk, dan kekaisaran di pindah dari Kyoto. Kendati demikian, angin perubahan itu sama sekali belum bertiuip hingga Saitama Utara. (Watanabe, 1970: 7)

Politik Kesehatan

Perbaikan sumber daya manusia, sarana, maupun prasarana aspek kesehatan dalam novel *Hanauzumi* digambarkan pengarang sebagai wujud keterkaitan antara keputusan bermuatan politik, yaitu mengikuti pengobatan ala kedokteran Barat yang dikeluarkan sebagai kebijakan oleh pemerintah Meiji dengan tanggung jawab yang diemban Kekaisaran demi keberhasilan kemajuan pembangunan. Hal ini tampak secara implisit sekaligus sebagai upaya pemerintah Meiji dalam menanamkan doktrin, prinsip, maupun kesepakatan-kesepakatan negara melalui reformasi aspek kesehatan.

Gin pulang kembali ke desa kelahirannya setelah menyadari dirinya tertular penyakit *gonorrhoea* dari suaminya. Kabar adanya perubahan besar-besaran di Tokyo mendorong keinginan Gin untuk berobat ke ibu kota Jepang tersebut. Suasana menuju era modern yang masih dilingkupi dengan nada pemikiran konservatif era Tokugawa yang ditampilkan oleh pengarang menjadikan Gin sebagai tokoh utama menjalani hidup dan

berjuang di tengah pertentangan budaya tersebut.

Pada 1868, rumah sakit sipil pertama didirikan di Jepang. Yaitu rumah sakit Ghosinpei di Kyoto dan Osaka. Rumah sakit militer yang dulu didirikan di Yokohama pada saat perang Boshin, pada periode Meiji dipindahkan ke kediaman Todo klan di Shintaya-Izumicho di Tokyo dan namanya berubah menjadi Daibyoin (rumah sakit besar). Daibyoin mengalami beberapa kali pergantian nama hingga pada 1877 menjadi Fakultas Kedokteran Universitas Tokyo. Di Tokyo pendirian Rumah Sakit Prefektur dimulai pada 1873 berdasarkan petisi yang diajukan kepada Dewan Kerumahtanggaan Kekaisaran oleh Dr. Sato Takanaka dari Junten-do (Saito, 2002:17).

Selama periode Meiji, Jepang dengan antusias mengadopsi sistem politik, ekonomi, pendidikan, ilmu pengetahuan dan teknologi, dan obat-obatan gaya Barat (Kim, 2005:255). Ketika itu, sejumlah rumah sakit di Jepang digunakan sebagai lahan pelatihan pendidikan kedokteran Barat yang secara bertahap tumbuh karena kebijakan pemerintah nasional untuk mengendalikan praktik obat herbal China dan fokus pada pengobatan Barat (Sakai, 2011:351).

Pada akhir zaman Edo, para cendekiawan umumnya membaca buku kedokteran China serta karya klasiknya, yang berarti bahwa mereka semua setidaknya memiliki sedikit pengetahuan kedokteran. Sejak awal Restorasi Meiji, bagaimanapun juga, ilmu kedokteran di Jepang telah berubah haluan dengan mengikuti ilmu kedokteran Barat. Kepada dr. Sato yang telah mendapat pendidikan pengobatan Barat inilah Gin mempercayakan penyembuhan penyakitnya, serta kepada rumah sakit yang telah memberikan kemudahan pelayanan itulah pada akhirnya Gin memperoleh perawatan. (Watanabe, 1970: 114)

Selain itu, dr. Shochu Sato juga merupakan kepala rumah sakit Juntendo di Tokyo yang merupakan dokter bedah yang terkenal dan dihormati di seluruh kawasan Kanto. Dia datang ke Tokyo pada usia sepuluh tahun untuk belajar ilmu China klasik dan pengobatan, lalu pada usia enam belas tahun dia sudah mulai mempelajari ilmu pengobatan Barat di bawah bimbingan Daizen Sato. Pada 1843, Daizen Sato pulang ke kampung halamannya di Sakura untuk membangun Rumah Sakit Sakura Juntendo, Shochu ikut bersamanya. Daizen semakin menyayangi dan menghargai bakat luar biasa yang dimiliki muridnya itu dan sepuluh tahun kemudian menobatkan Shochu sebagai penggantinya, lalu mengangkatnya menjadi bagian dari keluarga Sato. Bahkan, kemudian hari pemerintah baru Meiji menganugerahi Sati berbagai gelar, termasuk Dokter Kepala Kerajaan.

Penganugerahan gelar Dokter Kepala Kerajaan dalam novel *Hanauzumi* digambarkan pengarang sebagai wujud keterkaitan antara keputusan bermuatan politik yaitu mengikuti pengobatan ala kedokteran Barat yang dikeluarkan sebagai kebijakan oleh pemerintah Meiji dengan tanggung jawab yang diemban Kekaisaran demi keberhasilan kemajuan pembangunan secara keseluruhan. Hal ini tampak secara implisit sekaligus sebagai upaya pemerintah Meiji dalam menanamkan doktrin, prinsip, dan kesepakatan-kesepakatan negara melalui reformasi aspek kesehatan.

Politik Kesetaraan Gender

Dalam novel *Hanauzumi*, politik negara berperan juga secara tidak langsung terhadap kebijakan bermuatan gender. Walaupun peralihan kekuasaan pemerintah sudah terjadi, namun doktrin maupun prinsip era

pemerintahan sebelumnya (Tokugawa) selama dua ratus tahun lebih masih menghalangi hak dan kewajiban perempuan pada era Meiji sekalipun. Semangat mendobrak tradisi yang patriarki ini tidak pernah surut dilakukan Gin. Upaya-upaya yang sering kali malah menyudutkan dirinya terus diikhtikan.

“...Sekolah-sekolah dan akademi swasta yang baru didirikan, di mana para perempuan melatih diri mereka dalam membaca dan menulis. Perkembangan ini tidak bertentangan dengan aturan Tokugawa karena filosofinya menuntut pendidikan perempuan” (Jacob, 2015:3). Namun demikian, budaya yang mengakar di masyarakat Jepang saat itu mencerminkan belum adanya kesetaraan antara laki-laki dan perempuan. Apa yang diharapkan dari perempuan Jepang saat itu adalah menjadi istri yang baik dan ibu yang bijaksana, bukan perempuan yang kuat dan berani. Tugas mereka adalah meningkatkan kebahagiaan antara suami dan istri, membesarkan anak-anak, memasak dan mengelola ekonomi rumah tangga sehingga laki-laki dapat bekerja di luar rumah (Patessio, 2001:22).

Sebelum periode Meiji, sangat mudah untuk mendefinisikan peran seorang perempuan di masyarakat Jepang. Periode Tokugawa, pemerintahannya sangat bergantung pada ajaran dan cita-cita Konfusianisme. Sangat bergantung pada teks yang dikenal sebagai *Onna Daigaku*. Teks ini hanyalah salah satu contoh bagaimana perempuan pada zaman Tokugawa dan sebelumnya tidak memiliki saluran budaya untuk keinginan, harapan, impian, atau persyaratan mereka sendiri (Bruce, 2014:6). Anjuran moral yang berbasis pada filosofi konfusianisme yang dilembagakan kala itu memang tampaknya juga kurang efektif. Lebih menekankan teori belaka hampir tanpa penerapan. Dalam ajaran ini belum tergambar prinsip

kesetaraan termasuk kesetaraan gender. Perempuan lebih banyak dibebani kewajiban dibandingkan hak-haknya (Ong, 2017:26). Perempuan adalah perempuan karena kebaikan mereka, yaitu keanggunan, kasih sayang dan kejujuran. Kualitas yang membuat anak-anak dan suami mereka bahagia, bukan matematika atau bahasa Inggris. Surga menetapkan perempuan untuk membuat keluarga mereka bahagia, dan ini bisa diperoleh dengan baik secara alamiah, bukan dari pengetahuan (Patessio, 2001:24). Kungkungan adat seperti inilah yang masih menyelimuti kehidupan Gin di dalam perjalanan hidupnya.

Kayo adalah perempuan yang bijak, tapi konservatif. Bahwa Gin sangat menyukai buku saja sudah sangat membuatnya malu dan Gin tahu bahwa ibunya takkan pernah mungkin mengizinkan dirinya pergi ke Tokyo untuk mengejar cita-cita yang tidak pantas seperti menjadi dokter. Sepertinya akan sangat sulit baginya meyakinkan sang ibu akan keseriusannya. Ini adalah masa ketika perempuan tidak pantas bersekolah, apalagi sampai memiliki pekerjaan. Dan, yang lebih penting lagi, profesi dokter adalah cita-cita yang terlalu mulia sehingga bahkan laki-laki pun tak banyak yang mau mengerjakannya. (Watanabe, 1970:88)

Zaman itu, jika hendak makan perempuan harus menunggu sampai para laki-laki selesai, berjalan beberapa langkah di belakang para laki-laki, dan selalu berbicara dengan hormat ketika menghadapi mereka. Kalau seorang laki-laki mengatakan sesuatu, jawaban yang diharapkan dari perempuan adalah "Ya, saya mengerti". Persoalan perempuan diharuskan terbatas pada pekerjaan rumah tangga dan mengasuh anak saja. (Watanabe, 1970:178)

Seiring dengan pergerakan zaman,

kesadaran laki-laki Jepang terhadap kesetaraan gender mulai bergeser, terutama mereka yang sudah terpapar oleh budaya barat yang menyebarkan arus gelombang feminisme. Namun, bagi mereka yang menentang kesetaraan antara laki-laki dan perempuan, kodrat biologis perempuan selalu menjadi bahan argumen untuk mementahkannya. Selain itu, paham tradisi yang mengakar di Jepang bahwa laki-laki lebih cerdas dari perempuan juga sering dijadikan alasan untuk merendahkan kaum hawa, khususnya yang terkait dengan hak mendapatkan pengetahuan setinggi-tingginya. Pengarang menggambarkan Ginko yang terbelenggu dengan suasana tradisi yang masih mengakar kuat dengan arus modernitas yang sedang melanda pemerintahan Jepang. Pertentangan antara nilai tradisi dan modern inilah yang menjadi pokok persoalan.

Politik Pendidikan

Politik pendidikan yang dikembangkan di periode awal Meiji masih terkesan ambigu. Padahal, dalam politik pendidikan yang dideklarasikan oleh Pemerintahan Meiji tahun 1872 membawa antusiasme reformasi yang menolak ketidaksetaraan kelas, termasuk mendorong para perempuan untuk menggunakan pendidikan sekolah apapun kelasnya (Kiguchi, 2005:136). Memang pada era Tokugawa belajar dipandang sebagai privasi eksklusif para samurai dan atasannya. Petani, perajin, pedagang, dan perempuan diabaikan sama sekali dan bahkan tidak mempunyai pengetahuan yang berarti. Itu adalah ketidaktahuan yang menyebabkan manusia tersesat, membuatnya miskin, mengganggu keluarganya, dan pada akhirnya menghancurkan hidupnya (Kiguchi, 2005:136). Ada upaya Kementerian Pendidikan di awal Pemerintahan Meiji untuk membenahinya, tetapi mengalami hambatan masa-

lah keuangan dan kendala ideologis. Wajib belajar di tingkat pedesaan mendapat tantangan dari para petani yang keberatan atas target prioritas yang ditetapkan. Bagi mereka, kecukupan makan lebih utama dari pemenuhan pendidikan (Sumikawa, 1999:13; Saito, 2002:16). Karena bias gender, anak perempuan seharusnya tidak mendebat terkait dunia pendidikan. Orang tua yang terlibat dalam industri primer di desa-desa pertanian dan nelayan, serta di daerah pegunungan, tidak mau mengirim anak perempuan mereka ke sekolah. Ada kecenderungan pemikiran bahwa pendidikan Barat tidak akan berguna untuk kehidupan sehari-hari mereka (Watanabe, 2011:29).

Sekolah-sekolah perempuan baru didirikan di kota-kota besar Jepang. Banyak gadis yang menghadiri sekolah-sekolah ini berasal dari kelas menengah atas atau bangsawan, gadis-gadis dengan keluarga yang memiliki cukup uang untuk membayar biaya kuliah yang mahal (Sumikawa, 1999:13; Bruce, 2014:3). Ketika Gin diizinkan pergi belajar di Tokyo, seiring dengan itu terjadi pergeseran-pergeseran terkait politik pendidikan di Jepang.

“Sekarang tentang sekolah itu...” kata Gin. “Mereka sedang membangunnya di Hon-go. Sekolah akan dimulai musim gugur ini.”

“Apakah sekolah itu dikelola pemerintah?”

“Ya. Mereka akhirnya memutuskan untuk membuka pengajaran bagi perempuan. Para perempuan yang lulus dari sekolah itu – Sekolah Guru Perempuan Tokyo – akan bisa mendapatkan pekerjaan.”

“Itu sebuah langkah besar.”
(Watanabe, 1970:142-143)

Para misionaris Amerika dan orang-orang Kristen berupaya untuk menghapus sistem

patriarki maupun prostitusi. Mereka juga percaya pada monogami, mengusahakan pendidikan bagi perempuan serta memperjuangkan kesetaraan laki-laki dan perempuan di rumah. Pendidikan sekolah dimulai pada zaman Meiji, sementara kesetaraan jenis kelamin dan sistem monogami telah disebarkan oleh para intelektual secara bertahap. Pemerintahan Meiji mendeklarasikan Peraturan Pendidikan Dasar pada 1872 yang membawa antusiasme reformasi yang menggabungkan rasa hormat terhadap pendidikan yang digunakan di sekolah (Kiguchi, 2005:136). Selain itu, pemerintahan Meiji telah menciptakan pandangan lain tentang perempuan dan tempat mereka di masyarakat. Citra kebaikan istri dan ibu yang bijaksana akan memberikan citra perempuan ideal dalam dekade berikutnya (Bruce, 2014:12; Jacob, 2015:6). Dalam suasana berkehidupan yang seperti inilah, Ginko berkiprah.

Kenyataannya kebijakan ini tetap membatasi ruang gerak perempuan untuk mengenyam pendidikan. Ditegaskan dalam peraturan dimaksud bahwa laki-laki harus menghadiri sekolah dari usia delapan hingga lima belas tahun. Sedangkan untuk perempuan dari usia delapan hingga dua belas tahun (Patessio, 2001:21; Saito, 2002:15; Anderson, 2013:52). Pembatasan tersebut tercermin dalam peraturan lembaga pemerintah sebagaimana terlihat dalam kutipan berikut:

Lembaga pemerintah yang mengatur pendidikan menyatakan bahwa “kecuali di sekolah dasar, laki-laki dan perempuan harus dididik secara terpisah.” Hal ini mengingatkan pada zaman Tokugawa bahwa “anak laki-laki dan perempuan tidak boleh tinggal bersama-sama setelah usia tujuh tahun” – suatu kebijakan agar para perempuan tetap tunduk pada laki-laki yang ditulis dalam kebijakan pemerintah Meiji yang baru, dengan sedikit perubahan. Kebijakan ini tetap dijalankan sampai undang

-undang dasar Jepang yang berlaku saat ini diresmikan setelah Perang Dunia II. (Watanabe, 1970:145-146)

Pengalaman masa lalu Ginko yang cukup kelam sebagai istri, dan kesulitannya saat bersekolah dokter karena berjenis kelamin perempuan, mendorongnya untuk mengge-luti dunia keagamaannya dengan lebih ber-pihak kepada kaum hawa. Modernisasi Je-pang sejak Zaman Meiji memang telah men-gubah wawasan masyarakat terkait wacana perempuan tradisional. Keberadaan per-empuan mulai diperhitungkan dalam berbagai bidang kehidupan, seperti pendidi-kan, kesehatan, pekerjaan, keagamaan dan sebagainya.

Politik Pendidikan Dokter

Memasuki era Meiji tidak banyak cara un-tuk mendapatkan gelar di bidang kedokteran, apalagi bila hanya khusus di bidang pen-gobatan Barat. Di seluruh Jepang, hanya ada tiga lembaga yang dapat memberi gelar kedokteran: masing-masing ada di Tokyo, Nagasaki, dan Chiba. Di Nagasaki, ada Seito-kukan, sebuah rumah sakit pendidikan untuk dokter magang yang diselenggarakan oleh pemerintah. Tokyo adalah kota tempat Daigaku Higashiko terletak. Sekolah ini yang kemudian menjadi Fakultas Kedokteran To-kyo. Di Chiba, ada Sakura Juntendo, sekolah kedokteran swasta yang didirikan oleh Daizen Sato.

Di setiap angkatannya, sekolah-sekolah itu tak pernah mengambil lebih dari 20 atau 30 mahasiswa. Pemuda di seluruh negeri ber-saing habis-habisan untuk memperebutkan semua kursi yang tersedia. Sudah menjadi rahasia umum bahwa hanya laki-laki yang memiliki kenalan di pemerintahan Meiji yang baru yang bisa mendaftar. Setelah lulus,

mereka masih harus bisa lolos dalam dua tahap ujian lisensi untuk bisa mendapatkan izin prak-tik dokter. Dalam kasus Ginko, masih ada ham-batan yang lebih besar, yaitu baik sekolah negeri maupun swasta tidak menerima maha-siswi, dan tak seorang pun bisa mengikuti ujian lisensi kalau bukan lulusan dari salah satu sekolah itu. Semua jalan untuk bisa menjadi dokter sepenuhnya tertutup bagi perempuan. Melihat keadaan ini, keyakinan Gin tampak tak lebih dari sebuah ungkapan gila-gilaan dari seorang Gin saja. Hal ini juga tampak pada kutipan novel *Hanauzumi* yang menggam-barkan hanya para putra-putra mantan samu-rai saja yang bisa menduduki kursi perguruan tinggi kedokteran.

Kursi-kursi di perguruan tinggi kedokteran umumnya terbatas bagi putra-putra mantan keluarga samurai yang terkenal atau orang-orang yang memiliki surat pengantar dari orang terkemuka. Usia para mahasiswa berkisar antara di bawah dua puluh sampai empat puluhan dan banyak dari antara mereka berpembawaan kasar dan pernah bertarung dalam pergolakan Restorasi Meiji yang baru saja terjadi. Mereka tidak lagi diizinkan menyandang pedang, tetapi sua-sana perguruan tinggi tersebut cenderung terasa seperti perkumpulan para preman yang gemar mencari gara-gara. (Watanabe, 1970:173)

Sepanjang mengikuti pendidikan sebagai mahasiswi kedokteran, perilaku diskriminatif kerap dialami Ginko. Hanya semangat yang membara saja yang membuat dia bertahan dengan segala nuansa kebencian, baik ujaran maupun tindakan, bahkan persekusi dari teman-teman sekolahnya. Walaupun teror menjadi bagian dari kehidupannya selama mengenyam pendidikan di Kojuin, pada Oktober 1883 akhirnya Ginko dinyatakan lulus pendidikan dokter, serta menjadi satu-satunya perempuan,

dengan predikat terbaik mengalahkan mahasiswa laki-laki. Tidak otomatis kelulusannya ini menjadikan Ginko sebagai seorang dokter. Kebijakan pemerintah tampaknya juga belum bersahabat untuk mewujudkan cita-citanya. Di bawah Undang-Undang Sekolah Tertentu, lulusan Sekolah Kedokteran Perempuan Tokyo tidak bisa diterima untuk praktik medis. Sekolah diminta untuk mendapatkan status sekolah yang ditentukan oleh Sekolah Kementerian Pendidikan. Namun, ada banyak persyaratan yang harus dipenuhi dan standar pencapaian yang diperlukan untuk siap dipromosikan. Meskipun kepala sekolah telah berulang kali mendatangi Kementerian Pendidikan, mereka masih belum mau menerima aplikasi tersebut (Watanabe, 2011:33) sebagaimana terlihat dalam kutipan berikut:

Pada 23 Oktober 1883, Dewan Besar Negara menetapkan sistem baru peraturan lisensi kedokteran yang berlaku sejak 1 Januari 1884. Sejak tanggal tersebut, semua orang yang ingin mendirikan usaha praktik medis harus mengikuti ujian lisensi dari pemerintah dan hanya mereka yang lulus yang akan diizinkan untuk melakukan praktik kedokteran. Lulusan universitas kedokteran kekaisaran dan daerah dibebaskan dari peraturan ini, juga para dokter yang mendapatkan lisensi dari universitas-universitas kedokteran di luar negeri. Mereka bisa meminta agar lisensi mereka disesuaikan setelah adanya pengamatan atas kualifikasi mereka. (Watanabe, 1970:224-225)

Sebelum peraturan ini dibuat, semua dokter diberi lisensi oleh pemerintah daerah. Namun kemudian semua perizinan itu ditangani oleh Kementerian Dalam Negeri. Sentralisasi ini memungkinkan kementerian menciptakan daftar nasional para dokter dan meletakkan dasar-dasar untuk sistem perizinan kedokteran yang modern dan ter-

standarisasi, meskipun pada tahun 1906, sebelum sistem itu direformasi, negara mewajibkan semua dokter mengikuti ujian lisensi kedokteran.

Ginko lulus dari sekolah kedokteran tepat saat peraturan perizinan kedokteran yang pertama ini diberlakukan. Tak satu pun dari pengecualian tersebut diterapkan baginya sehingga dia harus lulus ujian lisensi—kecuali jika perempuan tidak diizinkan untuk mengikuti ujian tersebut. Memang, Ginko adalah perempuan pertama yang mendaftarkan diri. Harapan muncul ketika Ishiguro memiliki sebuah rencana untuk diajukan sebagai permohonan yang menyatakan seorang perempuan dapat mengikuti ujian lisensi kedokteran. Ditambah dengan pengetahuan umum yang dimiliki Ginko bahwa dalam kitab undang-undang kuno *Ryo no gige* tercantum kata 'dokter perempuan'. Kerja keras Ishiguro dan Ginko tercermin dalam kutipan novel *Hanauzumi* di bawah ini.

"Itu dicantumkan di sini, dalam kitab undang-undang kesehatan paling kuno di Jepang... *Ryo no gige* dengan jelas menyebutkan dokter perempuan." Pernyataan cendekiawan terkemuka dalam kesusasteraan klasik Jepang, Yorikuni Inoue, yang memberi kesaksian tentang hal ini telah sangat membantu Ishiguro menyampaikan kasusnya dengan percaya diri. "Seluruh negara Barat yang maju punya dokter perempuan. Jepang akan ditertawakan habis-habisan jika menolak dihapuskannya kebijakan era Edo."

"Saya selalu berkeyakinan bahwa kita harus mengizinkan perempuan ikut ujian. Tidak perlu merevisi undang-undangnya, tetapi cukup memodifikasi salah satu prosedur yang sudah ada. Seandainya pendapat umum mendukungnya, tentunya tidak ada masalah dalam memberi izin." (Watanabe, 1970:274-275)

Politik Birokrasi

Mantan-mantan samurai yang masih diberi kesempatan berkuasa di era Meiji tampaknya tetap kental jiwa feodalnya. Birokrasi yang semestinya melayani sesuai napas restorasi, bahkan menjadi ajang untuk menunjukkan kepongahan diri. Dengan berlandung dalam payung adat, mereka leluasa memberi tafsir atas peraturan yang telah dibuat. Dalam zaman Meiji, sejak 1880 pemerintahan Jepang berubah menjadi pemerintahan parlementer, tetapi dalam praktiknya pemerintah memiliki otoritas melampaui parlemen. Oleh karena itu, pemerintah demokrasi yang sesungguhnya tidak terlaksana (Tobing, 2006:55) sebagaimana tercermin dalam kutipan berikut:

Konstitusi tersebut merupakan langkah terakhir untuk mengesahkan pemerintahan Meiji sebagai negara modern, dan Dewan Kekaisaran yang pertama akan dilaksanakan pada tahun berikutnya, November 1890. Namun, menjadi jelas terlihat bahwa tidak lama setelah itu, negara ternyata tetap dikelola oleh faksi birokrat seperti pemerintahan sebelumnya. Pemerintah konstitusional hanya sebatas nama. Tidak hanya itu, hukum yang memungkinkan terpilihnya pejabat tidak memberikan hak bagi perempuan untuk memilih dan dengan sewenang-wenang melarang perempuan untuk menyatakan pandangan politik mereka. (Watanabe, 1970: 372)

Semangat perubahan yang didorong oleh pemerintahan Meiji belum sepenuhnya dapat diadaptasi di dalam kantor-kantor pemerintah ketika melayani masyarakat. Pelayanan yang diterima oleh Ginko pun tidak luput dari kendala. Perilaku birokrasi salah yang tertanam selama lebih dari 250 tahun, terutama yang dijalankan oleh mantan-mantan pejabat era Tokugawa menjadi faktor

penting penghambat iklim pelayanan keterbukaan yang didengung-dengungkan oleh pemerintahan Meiji. Merekalah yang tidak jarang menambah beban derita Ginko dalam upayanya meraih cita-cita.

Politik Keterwakilan

Dalam keadaan yang tidak mendukung bagi perempuan untuk mendapatkan pendidikan, merupakan suatu hal yang luar biasa bahwa Sekolah Guru Perempuan akhirnya berhasil didirikan. Tanpa terkecuali, perempuan-perempuan usia muda yang mendaftar di tahun pertama pembukaan sekolah tersebut, termasuk juga Ginko, memperoleh pertentangan dari keluarga mereka. Restorasi Meiji dianggap sebagai era peradaban dan pencerahan, tetapi hal ini hanya terlihat dan terasa di lapisan masyarakat tertentu, yaitu Tokyo dan Yokohama. Selain di dua kota tersebut, cara pandang lama masyarakatnya masih mengakar kuat. Pengarang memosisikan tokoh perempuan sebagai pihak yang mengintrodusir dan menyelesaikan konflik dalam menghadapi kelangkaan eksistensi adat istiadat dan kebijakan pemerintah yang merugikan perempuan.

Tantangan kehidupan tampaknya tidak hanya dialami Gin terkait dengan masalah pendidikan bagi perempuan. Bahkan persoalan sederhana tapi berdampak pada jati diri. Nama dan panggilannya. Keresahan akan ketidakadilan dalam tradisi ini dia letupkan begitu dia berhasil merengkuh bangku sekolah, untuk menunjukkan perlawanan sekaligus eksistensinya sebagai perempuan. Beranjak dari mulai diapresiasinya perempuan mendapatkan pendidikan, pengarang merepresentasikan Gin yang mengambil keputusan mengubah namanya menjadi "Ginko" yang kemudian menjadi Ginko Ogino. Sosoknya menjadi tokoh perempuan yang mengkritisi paham ideologi di

masyarakat.

Kematangan kompetensi yang dimiliki Ginko, membuatnya semakin matang dan menunjukkan kualitasnya. Obsesinya yang besar untuk menjadi dokter perempuan membawanya menghadapi segala macam tantangan dan hambatan dari adat istiadat maupun perumus kebijakan sebagai imbas peralihan kekuasaan Tokugawa yang selama 200 tahun lebih bertengger di Jepang menuju era pembaharuan Restorasi Meiji. Politik Tokugawa tersebut yang akhirnya merekonstruksi paradigma masyarakat terhadap pendidikan bagi perempuan. Padahal sejatinya, perjuangan dan pengorbanan tokoh utama tersebut berkeinginan untuk mengubah bentuk paradigma yang sudah mengakar kuat demi mengajak para perempuan berpikiran maju.

Perkembangan penting bagi perempuan Jepang dan bagi Ginko sendiri terjadi pada 1886, yaitu dengan dibentuknya Organisasi Perempuan Kristen Jepang (OPKJ). Ginko menjadi anggota OPKJ dengan menjabat sebagai Kepala Bidang Tata Krama dan Moral. Hal ini merupakan suara-suara aksi sosial perempuan di Jepang. Dengan Ginko menjadi seorang dokter, dia sekaligus juga bisa mempelajari orang-orang dari berbagai macam lapisan masyarakat. Pengetahuan dan pengalaman Ginko inilah yang semakin menambah kaya cara pandang revolusionernya.

Dia adalah Ginko. "Saya percaya bahwa akar dari kekejaman pada masyarakat ini adalah keberadaan rumah bordil dan pelacuran. Laki-laki membatasi kebebasan kaum perempuan dan memanfaatkan mereka sebagai mainan seksual. Manusia seharusnya dilarang melakukan hal itu terhadap manusia lain." Suara Ginko terdengar jelas di seluruh ruang rapat.

"Pelacur adalah sumber penyakit sosial. Laki-laki terinfeksi dan kemudian menularkannya kepada istri dan anak-anak mereka yang tak berdosa. Tak terhitung lagi jumlah perempuan yang menderita karena hal itu. Bagaimana kita bisa mengabaikan masalah ini, padahal kita tahu sumber dari penyakit mengerikan itu? Saya yakin bahwa tugas pertama Organisasi Perempuan Kristen ini adalah memberantas pelacuran."
(Watanabe, 1970:363)

Selama abad XIX, bentuk aktivitas perempuan Jepang berubah secara dramatis. Sebelum dan selama era awal Meiji pada akhir 1860-an, petani perempuan bergabung dalam pemberontakan, dan beberapa perempuan bertempur bersama laki-laki di perang pemulihan. Situasi berubah dengan munculnya periode Meiji, ketika sebagian besar aktivitas perempuan terjadi dalam konteks organisasi perempuan. Ledakan aktivitas telah mengarah pada pembentukan kelompok-kelompok perempuan dari berbagai keyakinan. Termasuk di antaranya asosiasi patriotik, kelompok Kristen, kelompok Budhis, dan asosiasi amal lainnya. Gagasan-gagasan yang dikembangkan terutama untuk mempromosikan pendidikan bagi anak-anak yang kurang mampu, serta perbaikan-perbaikan sosial lainnya. Hak pilih, tidak mengherankan, tidak ada dalam radar mereka (Anderson, 2013:44,46).

Kendati demikian, Ginko adalah pengecualian. Kehidupan Ginko tampaknya identik dengan kepedihan, kegigihan, dan kebetulan-kebetulan yang bermuara pada keberhasilan. Dengan bendera OPKJ, Ginko mendorong diajukan petisi untuk menuntut keadilan hak ketertwakilan. Petisi diajukan melalui partai utama yang ada dalam pemerintahan. Mereka berhasil mendapatkan hak bagi perempuan untuk menyaksikan sidang Dewan Kekaisaran. Ginko tidak hanya mencapai tujuannya, tetapi ini adalah aksi politis pertama yang dilakukan oleh

kelompok perempuan Jepang.

“Menurutku, kita harus mengajukan permohonan langsung kepada pemerintah.” Mereka semua setuju, lalu memutuskan untuk menghubungi partai utama yang ada dalam pemerintahan, Taiseikai (Perkumpulan Cita-Cita Agung), dan mengimbau untuk menarik kembali hukum yang baru tersebut. Kajiko Yajima menggunakan pendapat Ginko dan perempuan-perempuan lainnya untuk menulis petisi, yang ditandatangani oleh dua puluh satu perempuan, termasuk Kajiko Yajima dan Ginko sendiri. (Watanabe, 1970:374)

Namun, seakan-akan hal itu belum cukup baginya, tidak lama kemudian dia diusulkan menjabat sebagai sekretaris Asosiasi Kesehatan Perempuan Jepang. Tahun berikutnya, 1889, dia diminta untuk mengajar kesehatan dan psikologi di Sekolah Perempuan Meiji sekaligus menjadi dokter. Mengajar topik seperti itu kepada perempuan sangat penting, dan memilih seorang dokter perempuan hanya demi kepraktisan. Ginko setuju melakukan keduanya. Ginko lalu menjadi tokoh masyarakat yang hidup dan bekerja di bawah sorotan publik.

Ginko mengakrabi segala macam tantangan dan hambatan adat istiadat serta kebijakan birokrasi yang ada dengan prestasinya yang berhasil menjadi dokter perempuan pertama di Jepang dan membuka Klinik Obstetri dan Ginekologi Ogino. Sebagai intelektual terpandang, selain mengabdikan dirinya sebagai dokter perempuan, Ginko juga melakukan aktivitas sosial lain, termasuk berorganisasi, yang masih erat kaitannya dengan perjuangan kesetaraan laki-laki dan perempuan.

Ginko menjadi terkenal di antara kaum terpelajar pada era Meiji sehingga hub-

ungannya dengan sesama cendekiawan pun meluas. Dia tidak dengan sengaja berusaha menarik perhatian, tetapi perhatian orang memang tak terelakkan. Dia dilahirkan dalam keluarga terkenal, cantik, dan mendapatkan pendidikan kelas satu, sekaligus mendapatkan kedudukan istimewa dalam masyarakat sebagai dokter. Dia telah menyelamatkan perempuan dari rasa malu sebagai pasien dan sekarang memimpin perjuangan untuk mendapatkan hak-hak perempuan dengan lebih luas.

Politik Keagamaan

Ginko diceritakan memiliki pengalaman keagamaan setelah berhasil menjadi dokter perempuan pertama di Jepang dan merasa mendapatkan banyak tantangan dalam profesinya. Ginko harus berhadapan dengan kondisi ekonomi para pasiennya yang tidak menentu, ketidakseriusan para pasiennya dalam berobat, penolakan dari masyarakat, serta terbatasnya obat-obatan. Rasa frustrasi menimpa dirinya, namun Ginko tidak kehilangan arah hidup. Agama Kristen menjadi penyelamat baginya. Keyakinan pada agama Kristen dan Yesus Kristus menolongnya keluar dari jebakan prinsip hidup egosentris. Selain itu, adanya keyakinan akan penemuan tujuan dan makna hidup yang ingin dicari oleh suami Ginko, Shikata, membuat dirinya yakin adanya surga dan menginginkan membangun komunitas Kristen.

Impian saya adalah pergi ke suatu tempat yang terbuka dan luas. Saya ingin menciptakan komunitas Kristen impian. Sebuah surga bagi orang-orang beriman. Kristen harus bisa hidup dengan serba berkecukupan, jauh dari birokrasi yang merepotkan. Seperti yang dilakukan peziarah ketika mereka membawa Mayflower ke Amerika.”... “Ke suatu tempat dengan tanah yang luas. Namun, saya belum tahu di

mana kiranya tanah itu berada. Itulah yang mulai saya pikirkan. Pasti ada di suatu tempat, dan impian saya akan terwujud jika orang-orang beriman itu memutuskan untuk ke sana juga. Kami akan mampu hidup seperti yang kami impikan. Apakah menurut anda itu bisa terwujud?"... "Saya akan perlihatkan kepada semua orang bahwa kita bisa memiliki surga bagi komunitas Kristen di bumi ini". (Watanabe, 1970:420-421)

Keinginan Shikata untuk membangun komunitas Kristen impian timbul karena birokrasi pemerintahan Meiji saat itu yang membelenggu umat Kristen. Para penganut Kristen tidak mendapatkan jaminan keselamatan dan kenyamanan dalam menjalankan praktik keagamaannya. Impiannya hanya ingin mendapatkan tempat yang terbuka dan luas untuk orang-orang beriman, agar surga bisa berada di tengah-tengah mereka.

Menurut Ong (2017: 65) pemerintah dan rakyat Jepang bersikap ambigu terkait penyebaran agama Kristen. Sebagai produk Barat, Kristen diterima sebagai wujud peradaban maju. Namun, dianggap sebagai masalah karena bisa mengganggu kepentingan nasional. Sementara Sumimoto (2000:22) menegaskan bahwa faktor-faktor yang menghambat pematangan budaya kebebasan beragama di Jepang adalah situasi apatis dalam beragama, rendahnya penghargaan terhadap hak asasi, tradisi sosial yang otoritarianistik, peradilan independen yang belum terakomodasi, dan masih adanya intoleransi agama.

Meskipun tidak seketat zaman Keshogunan, sebagai penganut agama baru, umat Kristiani di zaman Meiji tetap harus mengantisipasi perlakuan-perlakuan diskriminatif dari pemerintah ataupun masyarakat. Nosco (2007:92) mengungkapkan bahwa pada periode awal Meiji ketika penganiayaan formal

kelompok bawah tanah berakhir, sebagian dari mereka tetap memilih untuk memperhatikan karakter "bawah tanah" mereka sebagai organisasi rahasia yang semu. Ini bisa jadi merupakan pengembangan warisan kebencian terkait afiliasi kepada kuil Budha, tetapi mungkin juga karena mereka sudah terbiasa bahkan terpicat oleh aspek-aspek klandestain dari praksis keagamaan mereka.

Kegamangan Shikata terhadap kehidupan keagamaan di Jepang pada masa itu telah mendorongnya untuk merencanakan "hijrah" mencari wilayah yang benar-benar kondusif dalam menjalankan peribadatan. Agama Kristen selalu dituduh sebagai alat dominasi Barat. Para penganut Kristen tidak mendapatkan kebebasan, keamanan, dan kenyamanan dalam menjalankan praktik keagamaannya. Tidak heran Shikata menginginkan Hokkaido sebagai tempat hijrah komunitas Kristen demi lancar dan mudahnya mereka dalam beribadah.

"Di sini di daratan utama, agama Kristen selalu dituduh sebagai alat dominasi barat. Daripada berjingkat-jingkat dan selalu melihat dengan waspada pada pemerintahan yang belum mendapat pencerahan ini, lebih baik kita memiliki lahan untuk hidup bebas dan mengembangkan sayap. Di Hokkaido tidak ada yang melarang-larang dan menekan kita. Tanah dan air akan menjadi milik kita untuk kita gunakan sesuka hati. Kurasa tanah ini adalah tanda dari rahmat dan perlindungan Tuhan, Bukankah begitu?". (Watanabe, 1970: 463)

Adalah William Richardson (Oshiro, 2007:105) sosok yang menjadi pelopor misionaris New England yang datang ke Hawaii --saat itu merupakan pulau terpencil dari daratan Amerika-- pada tahun 1821 sebagai bagian dari kekuatan misionaris Evangelis yang dikirim oleh Dewan Komisaris Amerika untuk misi penyebaran Injil kepada orang-orang kafir.

Dia telah meletakkan dasar bagi westernisasi dan kristenisasi di pulau-pulau terluar. Sangat mungkin peristiwa ini yang turut serta mengilhami Shikata untuk memilih pulau terjauh dari Pulau Honsu sebagai daratan utama yang menjadi area prioritas kekuasaan pemerintah. Pulau itu adalah Hokkaido. Kebulatan tekad Shikata sudah tak terbendung lagi. Meskipun Hokkaido saat itu masih berwujud belantara tak bertuan, tetapi semangat untuk menyempurnakan akidah tanpa terganggu oleh intimidasi dari pemerintah menjadi suluh utamanya.

Di Jepang ada tiga kelompok yang diidentifikasi sebagai Kristen Liberal berasal dari Barat di puncak periode *okashugi* (radikalisasi barat) pada 1880-an. Pertama adalah *Universal Evangelic-Protestan Mission-Society*. Datang dari Jerman tahun 1885 dengan tokohnya Wilfried Spinner. Setahun kemudian diikuti oleh *America Unitarian* yang dikawal oleh Arthur M. Knapp. Selanjutnya pada 1890 *America-Versalist* dengan pelopornya George L. Perrin (Nirei, 2007:155). Beragamnya kelompok dalam Kristen inilah yang dipandang ikut mewarnai eksplorasi bumi Hokkaido sebagai tanah harapan bagi penganut agama tersebut.

Sebuah kelompok Episkopalian dari Kumagaya, Saitama, datang untuk mempelajari kemungkinan memindahkan sekelompok perintis dari gereja mereka ke Hokkaido. Pemimpin mereka, Kozaburo Amanuma, telah mendengar dari Profesor di Doshisha, Inukai Takeshi, tentang pemukiman yang dibangun Shikata, dan sekarang dia mengajukan permintaan untuk menghubungkan kelompoknya. Shikata dan kelompoknya memang sedang sangat membutuhkan bantuan tenaga, mereka pun dengan cepat mengatakan hal tersebut kepada anggota-anggota kelompoknya. "Tampaknya jumlah mereka lebih dari selusin. Tapi,

mereka dari golongan Gereja Episkopalian. Bagaimana pendapat kalian?" Kelompok Shikata berasal dari Gereja Kongregasi. Walaupun agama mereka sama-sama Kristen. Doktrin dan ritual keagamaan mereka berbeda. Namun, di alam liar yang jarang penduduknya ini, mereka tidak ingin berseleisih. "Apakah mereka pengikut Kongregasional atau Episkopalian, Kristen adalah Kristen. Dan jika kedua kelompok kita dengan tujuan yang sama ingin menghuni tanah ini, itu sudah cukup baik, bukan?" (Watanabe, 1970: 488-489)

Kongregasi dan Episkopalian merupakan dua kelompok ordo yang berbeda. Namun demi kepentingan yang sama yaitu membuka kawasan baru untuk hijrah, maka mereka mengabaikan perbedaan-perbedaan yang ada. Mereka membuat kesepakatan bersama dengan tetap berpedoman kepada ajaran paling mendasar dalam Kristen.

Menurut Nirei (2007:152), tantangan penting untuk pengembangan agama Kristen adalah dari dalam dan luar gereja. Di dalam gereja, konflik antar misionaris juga antar kelompok mengintensifkan isu-isu otonomi gerejawi. Dari luar gereja tentu terkait dengan kecurigaan birokrat negara dan masyarakat awam. Tantangan inilah yang juga dialami oleh orang beriman yang sedang membuka permukiman di Hokkaido. Perbedaan kelompok antara Kongregasi dan Episkopalian ibarat api dalam sekam. Akhirnya membakar juga.

Dalam buku *Systematic Theology* karya Berkhof (1949:431), sistem Kongregasi disebut juga sistem kemandirian. Setiap gereja atau jemaat adalah gereja yang lengkap, merdeka satu sama lain. Di gereja seperti itu kekuasaan pemimpin cukup mengikat anggota. Petugas hanyalah fungsionaris gereja lokal yang ditunjuk untuk mengajar dan mengelola urusan gereja serta tidak memiliki kekuatan memerintah di luar apa yang dimiliki sebagai ang-

gota gereja. Sementara sistem episkopalian memegang Kristus sebagai kepala gereja. Mempercayakan kepemimpinan gereja secara langsung dan eksklusif kepada suatu pemerintah dari uskup atau paus sebagai penerus rosul. Bahwa sistem ini telah membentuk para uskup menjadi ordo yang independen dan mandiri.

Penutup

Novel *Hanauzumi* karya Jun'ichi Watanabe setidaknya memiliki tujuh jenis wujud realitas politik era Restorasi Meiji. Wujud realitas politik tersebut berbentuk politik kesehatan, politik kesetaraan gender, politik pendidikan, politik pendidikan dokter, politik birokrasi, politik keterwakilan, dan politik keagamaan. Ketujuh wujud realitas politik tersebut mempunyai dan menjalankan peran politik masing-masing berdasarkan tujuan politik yang hendak dicapai. Pada era Meiji diharapkan tercipta tata tertib baru yang menghadirkan keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, namun belum semuanya mampu memenuhi harapan dimaksud. Benturan-benturan justru masih banyak dialami oleh Ginko, tokoh utama dalam novel ini, manakala berhadapan dengan produk-produk politik tersebut.

Daftar Pustaka

Agung, Leo. (2012). *Sejarah Asia Timur 7*. Yogyakarta: Ombak.

Anderson, Marnie S. 2013. Women and Political Life in Meiji Japan : The Case of the Okayoma joshi konshinkai (Okayoma Women's Friendship Society). *US-Japan Women Journal*, 44 no.1:43-66.

Berkhof, Louis. 1949. *Systematic Theology*. America: The Christian Digital Library Foundation, Inc.

Brown, Alexander D. 2005. Meiji Japan : A Unique Technological Experience? *Student Economic Review*, vol.19:71-83.

Bruce, Alix. 2014. Steel Chrysanthemums: Feminism and Nationalist Rhetoric in Meiji Japan. *Student Research and Creative Works*, 2014:1-38.

Budiardjo, Miriam. 2008. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Cahyasari, Intannia. 2017. Kekuatan Memori dan Ke(tidak)mungkinan Pengampunan dalam Novel Hanauzumi Karya Jun'ichi Watanabe. *JurnalPoetika*, Vol.V, No.8, 2017: 68-81.

Dubey, Arjun. 2013. Literature and Society. *IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)*, 9(6). 84-85.

Jacob, Frank. 2015. The Alteration of the Image – Woman and Japanese Society (1600-2000). *City University of New York (CUNY) Academic Works*.

Kiguchi, Junko. 2005. Japanese Women's Rights at the Meiji Era. *The 93th World Congress of The International Institute of Sociology*.

Kim, Dong-Won. 2005. On Morris Low's Building a Modern Japan : Science, Technology, and Medicine in Meiji Era and Beyond. *East Asian Science, Technology and Society in International Journal*, 1:255-258.

Nirei, Yosuke. 2007. Toward a Model Belief Modernist Protestantism and Problem of National Religion in Meiji Japan. *Japanese Journal of Religious Studies*, 34(1). 151-175.

Nosco, Peter. 2007. The Experiences of Christians During the Underground Years and Thereafter. *Japanese Journal of Religious Studies*, 34/1:85-97.

Ogundokun, Sikiru, A. 2013. Literature and Society: A New Reading of Sembene Ousmane's *Le Mandat*. *Journal of Studies in Social Sciences*, 5(1). 120-134.

Ong, Susy. 2017. *Seikatsu Kaizen*. Jakarta, Pen-

- erbit PT. Elek Media Komputindo. 163, work paper:1-18.
- Oshiro, George M. 2007. Nitobe Inazo and Sapporo Band : Reflections on the Dawn of Protestant Christianity in Early Meiji Japan. *Japanese Journal of Religious Studies*, 34(1). 99-126.
- Patessio, Mara. 2001. Iratsume and Journals for Women in the Early Meiji Period. *Proceeding of a Postgraduate Research Seminar in Japanese Studies, Oxford Brookes University, UK*.
- Patria, Nezar & Andi Arief. 2009. *Antonio Gramsci: Negara & Hegemoni*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Prastasari, Ni Luh Giri. 2014. "Upaya Tokoh Ogino Ginko Mencapai Kesetaraan Gender dalam Novel Hanauzumi Karya Jun'ichi Watanabe". *Humanis*, Volume 7. No.3.
- Ratna, N.K. 2013. *Teori, Metode, dan Teknik Penelitian Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Saito, Yasuo. 2002. *The History of Japan's Educational development*. Japan, JICA.
- Sakai, Shizu. 2011. History of Medical Care at Inpatient Facilities in Japan. *Japan Medical Association Journal*, 54(6):351-356.
- Segal, Ethan. 2015. Meiji and Taisho Japan: An Introductory Essay. *Center for Asian Studies. Program for Teaching East Asia*.
- Simon, Roger. 2004. *Gagasan-gagasan politik Gramsci*. Yogyakarta: Insist & Pustaka Pelajar.
- Sumikawa, Shunsuke. 1999. The Meiji Restoration: Roots of Modern Japan. *Asia*
- Sumimoto, Tokihisa. 2000. Religious Freedom Problems in Japan : Background and Current Prospect. *The International Journal of Peaces Studies*, 5(2).
- Surbakti, Ramlan. (2010). *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Takano, Yayori. 2010. Foreign Influence and the Transformation of Early Modern Japan. *Emory Endeavors in World History*, vol.3:82-93.
- Tami, R., Faruk, & Adi, I. R. 2016. Hegemonic Culture and Subaltern A Compromised Veil in Indonesian Islamic Popular Novel. *Lingua Cultura*, 11(1). 13-18.
- Tobing, Ekayani. 2006. *Keluarga Tradisional Jepang: dalam Perspektif Sejarah dan Perubahan Sosial*. Jakarta: ILUNI KWJ.
- Walsh, Anthony. 2009. Economies of Excrement : Public Health and Urban Planning in Meiji Japan. *Historical Perspectives : Santa Clara University Undergraduate Journal of History, Series II: vol.14, article 9*.
- Watanabe, Jun'ichi. 1970. *Hanauzumi*. Japan: Shinchousha.
- Watanabe, Yoko. 2011. Woman, Work, and Education in Modern Japan. *Lifelong education and libraries*, 11:25-56.
- Whitebrook, Maureen. 1995. Politics and Literature. *Political Studies Association*, Vol. 15, No. 1.
- Widodo, Heri. (2016). *Strategi Dominasi Patriarki dalam Novel Hanauzumi Karya Jun'ichi Watanabe*. Yogyakarta : Tesis Pascasarjana FIB UGM.